



Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul Kabupaten Kediri

Eрмаi Dwi Wandasari^{1*}, Yusuf Hariyoko², Wahid Hidayat³

¹⁻³ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ermaidwiandasari21@email.com

Abstract. *Poverty remains a persistent social issue and a major challenge in development, prompting the government to implement various social assistance programs as poverty alleviation efforts. However, the success of a program depends not only on policy formulation but also on its implementation in the field. This study aims to analyze the implementation of poverty alleviation programs in Dawuhan Kidul Village, Kediri Regency. Using a descriptive qualitative method, this study applies the policy implementation framework by Van Meter and Van Horn, which encompasses policy standards and objectives, resources, characteristics of the implementing agency, disposition of implementers, inter-organizational communication and enforcement activities, as well as the economic, social, and political environment. Data were gathered through interviews, observation, and documentation, and subsequently analyzed using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of poverty alleviation initiatives—including the Family Hope Program (PKH), Non-Cash Food Assistance (BPNT), food aid, and other social welfare schemes—has successfully helped residents meet their basic needs. Program execution is supported by coordination among implementers, available supporting facilities, and well-maintained communication between the village government, social assistants, and the community. Nevertheless, several bottlenecks remain, such as inaccurate targeting of beneficiaries, limited data updates, delayed distribution information, and social jealousy within the community. Furthermore, the village government's limited authority in selecting beneficiaries hinders the optimal resolution of emerging issues at the local level. In conclusion, while the implementation of poverty alleviation programs in Dawuhan Kidul Village has been reasonably effective, improvements are urgently required regarding data accuracy, inter-agency coordination, and the optimization of the village government's local authority..*

Keywords: *Data Accuracy; Policy Implementation; Poverty Alleviation; Social Assistance; Van Meter and Van Horn.*

Abstrak. Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan, sehingga pemerintah melaksanakan berbagai program bantuan sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Namun, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan, melainkan juga oleh implementasinya di tingkat lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul, Kabupaten Kediri. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksanaan, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), bantuan pangan, dan bantuan sosial lainnya telah memberikan manfaat dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pelaksanaan program juga didukung oleh koordinasi antar-pelaksana, ketersediaan sarana pendukung, serta komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa, pendamping sosial, dan masyarakat. Namun, implementasi program masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, keterbatasan pemutakhiran data, keterlambatan informasi penyaluran bantuan, serta munculnya kecemburuan sosial di masyarakat. Selain itu, kewenangan pemerintah desa dalam penentuan penerima bantuan masih terbatas, sehingga berbagai permasalahan yang muncul belum dapat diselesaikan secara optimal di tingkat desa. Kesimpulannya, implementasi program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul telah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan perbaikan pada aspek akurasi data, koordinasi pelaksana, dan optimalisasi kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.

Kata kunci: Akurasi Data; Bantuan Sosial; Implementasi Kebijakan; Pengentasan Kemiskinan; Van Meter dan Van Horn.

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang dihadapi Indonesia hingga saat ini. Berbagai program perlindungan sosial telah dilaksanakan pemerintah sebagai upaya mengurangi beban hidup masyarakat miskin dan rentan miskin. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi pencapaian tujuan program (Kusumawati & Toshihiro Kudo, 2019). Keberhasilan suatu program pengentasan kemiskinan tidak sekadar diukur dari idealnya perumusan regulasi di tingkat atas, melainkan sangat bergantung pada efektivitas proses implementasinya di tingkat akar rumput. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin nasional sempat mengalami fluktuasi akibat dampak pandemi COVID-19, dan meski mulai menunjukkan tren penurunan pascapandemi hingga mencapai 9,36 persen pada Maret 2023, angka tersebut masih berada di atas capaian target awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang menargetkan tingkat kemiskinan di kisaran 6,5–7,5 persen. Hal ini menegaskan adanya urgensi untuk mengevaluasi ketepatan pelaksanaan kebijakan jaminan sosial di tingkat lapangan.

Di tingkat regional, Provinsi Jawa Timur mencatat disparitas kemiskinan yang cukup mencolok, di mana kantong-kantong kemiskinan di wilayah perdesaan secara konsisten menunjukkan persentase yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Sebagai contoh, data BPS Jawa Timur menunjukkan angka kemiskinan perdesaan pada tahun 2025 berada pada angka 12,86 persen, berbanding terbalik dengan wilayah perkotaan yang menyentuh angka 7,00 persen. Tren kerentanan ekonomi ini juga linier dengan kondisi ekonomi makro di Kabupaten Kediri, yang mencatat angka kemiskinan sebesar 9,81 persen pada tahun 2025. Terlebih lagi, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Kediri pada periode tersebut masing-masing berada pada angka 1,00 dan 0,19, mengindikasikan bahwa jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan masih lebar dan ketimpangan di antara sesama penduduk miskin masih memerlukan intervensi kebijakan perlindungan sosial yang tepat sasaran.

Sebagai pilar utama penanggulangan kemiskinan di tingkat desa, pemerintah mengandalkan skema bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Program Sembako. Secara legalitas formal, pelaksanaan kedua program ini telah didukung oleh payung hukum yang kuat, termasuk Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako. Namun, realitas pelaksanaan di tingkat birokrasi terbawah sering kali memicu hambatan operasional yang serius. Persoalan teknis seperti

ketidakpastian jadwal pencairan dana bantuan, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hingga dugaan penyalahgunaan kartu bantuan sebagai jaminan utang oleh oknum warga menjadi indikasi awal adanya kendala dalam rantai birokrasi penyaluran jaminan perlindungan sosial di tingkat desa (Syahputra, 2024)

Secara lebih spesifik, fenomena empiris yang ditemukan melalui observasi awal di Desa Dawuhan Kidul, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan tata kelola yang memicu konflik horizontal. Salah satu temuan mencolok adalah ketidakseragaman dalam pemasangan stiker penanda pada rumah warga penerima manfaat. Terdapat rumah tangga penerima bansos lama yang melepas atau kehilangan stiker penanda dengan berbagai alasan fisik, sementara sebagian besar penerima manfaat baru yang terdata sejak tahun 2024 justru tidak mendapatkan penempelan stiker penanda sama sekali sejak awal menerima bantuan. Kondisi nir-transparansi ini berdampak langsung pada munculnya kecemburuan sosial antarwarga dan memperkuat persepsi adanya masalah ketidaktepatan sasaran. Masalah ini diperparah oleh keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial, sehingga aparat desa tidak mampu merespons dinamika perubahan status sosial-ekonomi warganya secara cepat dan optimal.

Berbagai penelitian terdahulu telah banyak mengkaji efektivitas bansos secara umum, seperti studi yang dilakukan oleh (Fanny & Megawati, 2022) mengenai aspek teknis penyaluran BPNT di Kabupaten Tuban menggunakan model Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih menghadapi berbagai kendala dalam proses implementasi. Namun, penelitian tersebut berfokus pada pelaksanaan BPNT, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi program pengentasan kemiskinan secara lebih luas melalui berbagai program bantuan sosial yang diterima masyarakat di tingkat desa. Selain itu, penelitian ini menyoroti persoalan ketidaksesuaian data penerima bantuan, keterbatasan kewenangan pemerintah desa, serta dinamika sosial masyarakat yang muncul dalam pelaksanaan program.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul, Kabupaten Kediri menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Analisis dilakukan melalui enam variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksanaan, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

pengembangan kajian implementasi kebijakan serta menjadi bahan masukan bagi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di tingkat desa.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian mengenai implementasi program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan berbagai pendekatan model. Evaluasi program bantuan sosial secara umum menggunakan indikator efektivitas dan efisiensi melalui teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (Wiwit et al., 2020). Selain itu, pendekatan administratif prosedural juga digunakan untuk mengukur ketepatan sasaran dan distribusi logistik program bantuan pangan (Rakhmadani et al., 2022). Beberapa studi mengonfirmasi bahwa kendala klasik seperti ketidaksinkronan data terpadu, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta terbatasnya kapasitas sumber daya manusia pelaksana masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program bantuan sosial di tingkat lapangan (Fanny & Megawati, 2022);(Salsabila et al., 2024).

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung berfokus pada evaluasi hasil program atau implementasi satu jenis bantuan sosial tertentu. Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena mengkaji implementasi program pengentasan kemiskinan secara lebih luas melalui berbagai program bantuan sosial yang diterima masyarakat di tingkat desa. Selain itu, penelitian ini menyoroti persoalan ketidaksesuaian data penerima bantuan, keterbatasan kewenangan pemerintah desa, serta dinamika sosial masyarakat yang muncul dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melengkapi kajian implementasi program pengentasan kemiskinan pada tingkat perdesaan.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat (Dunn, 2003). Menurut Dye (2002), kebijakan publik pada dasarnya mencakup segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, kebijakan publik diwujudkan melalui berbagai program perlindungan sosial yang ditujukan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin.

Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh proses implementasinya. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang menghubungkan tujuan kebijakan dengan realitas pelaksanaan di lapangan (Roudhotul Jannah, Fadillah Putra, 2022). Oleh karena itu, implementasi menjadi aspek penting untuk mengetahui sejauh mana tujuan kebijakan dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) sebagai alat analisis. Model ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu:

- a. Standar dan tujuan kebijakan.
- b. Sumber daya.
3. Karakteristik badan pelaksana.
 - a. Disposisi atau sikap pelaksana.
 - b. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksanaan.
 - c. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Keenam variabel tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul, Kabupaten Kediri.

Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Tingkat Desa

Program pengentasan kemiskinan di tingkat perdesaan dilaksanakan melalui berbagai program perlindungan sosial yang ditujukan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Salah satu program yang dilaksanakan adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu bantuan sosial bersyarat yang bertujuan meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Wahyuni et al., 2023)

Selain PKH, pemerintah juga melaksanakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako yang bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat. Di tingkat desa, upaya pengentasan kemiskinan juga diperkuat melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berbagai program tersebut menjadi instrumen perlindungan sosial yang diharapkan mampu mengurangi beban ekonomi masyarakat serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Desa Dawuhan Kidul, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Fokus penelitian mengacu pada model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang terdiri atas enam variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksanaan, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama untuk menjawab fokus penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap informan yang terlibat dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dan digunakan untuk mendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen, peraturan perundang-undangan, arsip desa, laporan terkait program bantuan sosial, jurnal ilmiah, buku, serta sumber literatur lain yang relevan dengan penelitian. Data tersebut digunakan untuk memperkuat analisis mengenai implementasi program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul Kabupaten Kediri.

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan mengenai pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi lapangan serta aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan sosial. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa dokumen, arsip, foto kegiatan, peraturan, dan data lain yang relevan dengan penelitian. Ketiga teknik tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan sesuai dengan fokus penelitian mengenai implementasi program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul Kabupaten Kediri.

Analisi Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar data. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian untuk memperoleh temuan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Melalui tahapan tersebut, data dianalisis untuk menjelaskan implementasi program pengentasan kemiskinan di

Desa Dawuhan Kidul Kabupaten Kediri berdasarkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

4. PEMBAHASAN

Standar dan Tujuan Kebijakan

Implementasi program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul telah memiliki standar dan tujuan yang jelas, yaitu membantu masyarakat miskin dan rentan miskin melalui program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, bantuan pangan, dan PBI-JK. Penentuan sasaran penerima bantuan juga telah mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga pelaksanaan program memiliki dasar administrasi yang jelas.

Meskipun demikian, penelitian menemukan masih adanya ketidaksesuaian antara data penerima bantuan dengan kondisi riil masyarakat. Beberapa warga yang kondisi ekonominya telah membaik masih tercatat sebagai penerima bantuan, sementara terdapat warga yang dinilai layak menerima bantuan namun belum masuk dalam data penerima. Selain itu, pola pencairan bantuan yang terkadang dilakukan secara rapel menyebabkan manfaat bantuan tidak selalu diterima pada saat masyarakat membutuhkan.

Menurut Van Meter dan Van Horn, kejelasan standar dan tujuan kebijakan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi. Oleh karena itu, indikator standar dan tujuan kebijakan dapat dikatakan telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan perbaikan pada aspek akurasi dan pemutakhiran data penerima bantuan.

Sumber Daya

Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul didukung oleh berbagai sumber daya, seperti pendamping sosial, perangkat desa, DTSEN, aplikasi Cek Bansos, kartu KKS, serta media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Keberadaan sumber daya tersebut membantu proses pendataan, koordinasi, dan penyaluran bantuan sosial.

Namun, keterbatasan jumlah pendamping sosial dan rendahnya kemampuan sebagian masyarakat dalam mengakses layanan digital masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia telah mendukung implementasi program, tetapi pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal.

Karakteristik Badan Pelaksana

Pelaksanaan program melibatkan berbagai aktor mulai dari pemerintah pusat, Dinas Sosial, pendamping sosial, pemerintah desa, kepala dusun, hingga RT. Pembagian tugas

tersebut menunjukkan adanya struktur pelaksana yang jelas dalam proses pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, dan pendampingan penerima manfaat.

Meskipun demikian, pemerintah desa memiliki keterbatasan kewenangan dalam menentukan maupun mengubah data penerima bantuan secara langsung. Akibatnya, berbagai keluhan masyarakat tidak selalu dapat diselesaikan pada tingkat desa. Oleh karena itu, indikator karakteristik badan pelaksana telah berjalan dengan baik, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.

Disposisi atau Sikap Pelaksana

Aparat desa, operator pelayanan, dan pendamping sosial menunjukkan komitmen yang baik dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Pelaksana dinilai responsif dalam memberikan pelayanan, membantu masyarakat memperoleh informasi, serta mendampingi keluarga penerima manfaat.

Di sisi lain, pelaksana masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait ketidaktepatan sasaran dan keterlambatan pencairan bantuan yang berada di luar kewenangan mereka. Dengan demikian, disposisi pelaksana telah mendukung pelaksanaan program, meskipun hasil yang dicapai masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar kendali pelaksana.

Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksanaan

Komunikasi program dilakukan melalui berbagai saluran, seperti pendamping sosial, grup WhatsApp, pertemuan KPM, pemerintah desa, dan RT. Selain itu, koordinasi juga dilakukan antara pemerintah desa, pendamping sosial, Dinas Sosial, dan instansi terkait lainnya.

Meskipun komunikasi telah berjalan cukup baik, informasi mengenai jadwal pencairan bantuan sering kali belum dapat disampaikan secara pasti karena bergantung pada informasi dari instansi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, indikator komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksanaan dapat dinilai cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan dalam aspek kepastian informasi kepada masyarakat.

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Desa Dawuhan Kidul turut memengaruhi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Bantuan sosial membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Namun, masih ditemukan kecemburuan sosial akibat adanya perbedaan persepsi mengenai kelayakan penerima bantuan.

Selain itu, sebagian besar masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dengan pendapatan yang tidak menentu masih memiliki ketergantungan terhadap bantuan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dapat menjadi faktor yang mendukung sekaligus menghambat implementasi program pengentasan kemiskinan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul Kabupaten Kediri melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan pangan, PBI-JK, dan bantuan sosial lainnya telah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Pelaksanaan program juga didukung oleh adanya standar dan sasaran yang jelas, keterlibatan berbagai aktor pelaksana, ketersediaan sarana pendukung, serta komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa, pendamping sosial, dan masyarakat.

Meskipun demikian, implementasi program masih menghadapi beberapa kendala, antara lain ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, keterlambatan dan ketidakpastian informasi pencairan bantuan, keterbatasan pemutakhiran data, serta munculnya kecemburuan sosial di masyarakat. Selain itu, keterbatasan kewenangan pemerintah desa dalam penentuan penerima bantuan menyebabkan berbagai keluhan masyarakat tidak dapat diselesaikan secara langsung di tingkat desa. Oleh karena itu, peningkatan akurasi data, optimalisasi pemutakhiran data penerima manfaat, penguatan koordinasi antar pelaksana, serta pemanfaatan mekanisme usul dan sanggah secara lebih optimal menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan program pengentasan kemiskinan di tingkat desa.

Saran

Pemerintah desa bersama pendamping sosial perlu meningkatkan sosialisasi mengenai mekanisme bantuan sosial, mengoptimalkan pemutakhiran data penerima bantuan secara berkala, serta memperkuat pendampingan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses layanan digital. Selain itu, proses graduasi bagi KPM yang kondisinya telah membaik perlu ditingkatkan agar bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

DAFTAR REFERENSI

- Ariyanto, D. P. A., & Nain, U. (2024). Empowerment of the poor in non-cash food assistance program in Tanjung Pinang City, Indonesia. *British Journal of Philosophy, Sociology and History*, 4(1), 10–18.
- Asrin, Yusuf, F., & A. S. (2022). Evaluasi kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai pada keluarga miskin di Kelurahan Baadia Kota Baubau. 1(2), 86–94.
- Darmiyanti, R. (2022). *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 1(1), 108–123.
- Erlinda, I., & M., N. A. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah. *画像診断*, 44(1), 66–67.
- Fanny, N. R. F., & Megawati, S. (2022). Implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. *Publika*, 407–418.
- Haliim, W., & Purba, D. (2023). Social and bureaucratic problems in social policy implementation in Indonesia: A study on the Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 7(1), 105–129.
- Imantria, B. (2024). Determinants of poverty in Indonesia: Does per capita income matter? *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 7(3), 244–256.
- Jannah, R., Putra, F., & S. (2022). Determinan perilaku street-level bureaucratic dalam mengimplementasikan program publik: Studi kasus pada Program Desa Cinta Statistik (Cantik) BPS tahun 2022. 6(3), 176–188.
- Kusumawati, A. S., & Kudo, T. (2019). The effectiveness of targeting social transfer programs in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 3(3), 282–297.
- Mulisalsabilla, S. A., & R., I. (2025). Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) in realizing a village without poverty in Sugihwaras Village, Candi District, Sidoarjo Regency. *Proceeding of International Conference on Social Science and Humanity*, 2(2), 546–559.
- Nuryitmawan, T. R. (2016). Studi komparasi kemiskinan di Indonesia: Multidimensional poverty dan monetary poverty. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 1(1), 29–36.
- Rakhmadani, S., Wardhana, Y., & Gusnita, A. (2022). Implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 6(2), 232–239.
- Safitri, M. I. D., Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). Indonesian treasury review. *Indonesian Treasury Review*, 6(3), 263–287.
- Salsabila, A., Priyanto, H., & Vitasari, L. (2024). Kolaborasi implementasi program BPNT dalam penanganan kemiskinan di Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. *Katarsis*, 1(3), 14–25.
- Sawitri, N., & Rahmat, W. (2024). Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Desa Pantai Harapan Kecamatan Cembaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1), 13.

- Syahputra, O. S. (2024). Pengentasan kemiskinan melalui Graduasi Sejahtera Mandiri Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia: Tinjauan sistematis. *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 265–279.
- Umara, G., & Murwati, A. (2026). Effectiveness of government social assistance programs: Case study of the Family Hope Program (PKH) in Bandar Lampung. *0*(02), 840–853.
- Wiwit, W., Kamil, M., & Sulistyaningsih, T. (2020). Monitoring dan evaluasi kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Batu. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(11), 1–12.